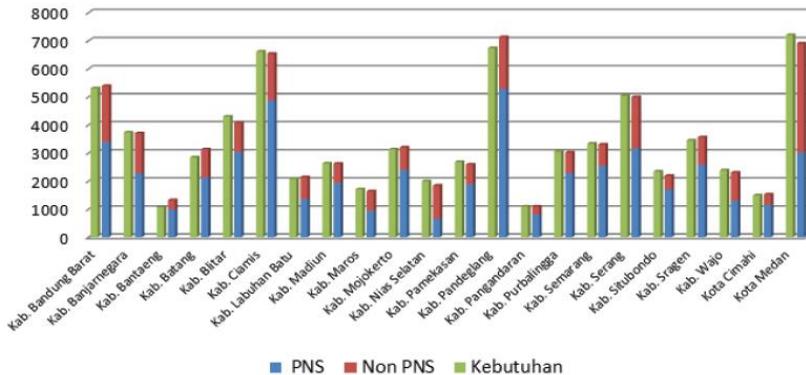




USAID PRIORITAS: Mengutamakan Pembaharuan, Inovasi, dan Kesempatan bagi Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa

PANDUAN PRAKTIS PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Diagram Kebutuhan dan Ketersediaan Guru Kelas SD (PNS dan Non PNS)



Praktik-praktik yang baik

Prinsip dan praktik pengelolaan pendidik yang baik

Peraturan Pemerintah Indonesia

Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students (USAID PRIORITAS)

PANDUAN PRAKTIS PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

[Practical Guide for Teacher Management and Deployment]

Contract AID-497-C-12-00003

August 2015

Prepared for

USAID/Indonesia

Prepared by

RTI International

3040 Cornwallis Road

Post Office Box 12194

Research Triangle Park, NC 27709-2194

RTI International is a registered trademark and a trade name of Research Triangle Institute.

The authors' views expressed in this publication do not necessarily reflect the views of the United States Agency for International Development or the United States Government.

Panduan praktis penataan dan pemerataan guru ini dikembangkan dengan dukungan penuh rakyat Amerika melalui *United States Agency for International Development* (USAID). Isi dari panduan praktis ini merupakan tanggung jawab konsorsium Program *USAID Prioritizing Reform, Innovation, and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students* (PRIORITAS) dan tidak mencerminkan pandangan USAID atau pemerintah Amerika Serikat.

Kata Pengantar

Salah satu fokus kegiatan USIAD PRIORITAS pada komponen 2 (*Governance and Management*) adalah memfasilitasi kabupaten/kota dalam kegiatan Penataan dan Pemerataan Guru (PPG) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama 5 Menteri (Mendikbud, Mendagri, Menkeu, Menpan dan RB, serta Menag) pada tahun 2011. Dalam peraturan bersama tersebut, kabupaten/kota diwajibkan melakukan pemetaan kecukupan (distribusi) dan melaksanakan penataan dan pemerataan guru.

Untuk membantu para fasilitator dan pelaksana penataan dan pemerataan guru, USIAD PRIORITAS menyusun panduan praktis yang mudah dilaksanakan. Panduan ini dikembangkan berdasarkan dua pendekatan, yaitu pendekatan pemanfaatan *Good Practices* yang telah dilakukan oleh lembaga lain, termasuk pengalaman dari dunia internasional, dan pendekatan yang mengacu pada peraturan pemerintah yang menjadi payung hukum dalam kegiatan tersebut. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan penataan dan pemerataan guru tidak keluar dari kerangka hukum yang ada di Indonesia.

Pengguna utama panduan praktis ini adalah *Governance and Management Specialist* (GMS), *Short Terms Technical Assistances* (STTA), *Service Provider* (SP), *Provincial Coordinator* (PC), District Coordinator (DC), Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota dan Provinsi. Selain itu, panduan ini dapat digunakan secara terbuka oleh pemangku kepentingan lain yang memiliki kepedulian terhadap penataan dan pemerataan guru, termasuk donor lain.

Susunan isi dalam panduan ini mengacu pada tahapan kegiatan fasilitasi PPG pada kabupaten/kota, mulai dari penyamaan persepsi sampai dengan workshop implementasi kebijakan PPG. Sedangkan struktur dalam setiap tahapan disusun berdasarkan kerangka *Terms of Reference* (TOR), hal ini dimaksudkan untuk memandu penanggung jawab kegiatan dalam menyusun TOR yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

Semoga Bermanfaat.

Daftar Isi

I. PENDAHULUAN	1
A. Latar belakang	1
B. Tujuan	2
C. Pendekatan dan tahapan kegiatan	2
D. Pengertian Penataan dan Pemerataan Guru	4
II. SOSIALISASI/PENYAMAAN PERSEPSI	5
A. Persiapan Penyamaan Persepsi	5
B. Pelaksanaan Penyamaan Persepsi	6
III. WORKSHOP 1: ANALISIS DISTRIBUSI GURU	8
A. Persiapan Workshop Analisis Data	8
B. Pelaksanaan Workshop Analisis Data	9
C. Pendampingan Pasca Workshop I	9
IV. WORKSHOP 1: ANALISIS DISTRIBUSI GURU	12
V. WORKSHOP 2: ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU	13
A. Menyepakati Isu Strategis	13
B. Workshop Analisis Kebijakan	14
C. Pendampingan Pasca Workshop	15
VI. KONSULTASI PUBLIK	17
A. Finaslisasi Bahan Konsultasi Publik	17
B. Audiensi dengan Bupati/Walikota	18
C. Pelaksanaan Konsultasi Publik	18
VII. RENCANA IMPLEMENTASI	20
A. Identifikasi Kebijakan yang telah disepakati untuk ditindaklanjuti	20
B. Rancangan Workshop Implementasi Kebijakan	21
C. Pendampingan Rancangan Implementasi Kebijakan	23

Daftar Istilah dalam Modul PPG

APM	Angka Partisipasi Murni
APK	Angka Partisipasi Kasar
APS	Angka Partisipasi
AUS	Angka Usia Sekolah
Bappeda	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
DBE	Decentralized Basic Education
BKD	Badan Kepegawaian Daerah
D4	Diploma 4
DAPODIKDas	Data Pokok Pendidikan Dasar
DC Kabupaten)	District Coordinator (Koordinator Kabupaten)
Depag	Departemen Agama
DPRD	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
EMIS	Education Management Information System (Sistim Manajemen Informasi Pendidikan)
GMS	Government & Management Specialist
GTT	Guru Tidak Tetap
IPA	Ilmu Pengetahuan ALam
IPS	Ilmu Pengetahuan Sosial
JTM	Jumlah Jam Tatap Muka
KCD	Kantor Cabang Dinas
Kemdikbud	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
LSM	Lembaga Sosial Masyarakat
LK	Lembar Kerja
Mendagri	Menteri Dalam Negeri
MenKeu	Menteri Keuangan
MenPAN	Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
MI	Madrasah Ibtidaiyah
MTs	Madrasah Tsanawiyah
Mulok	Muatan Lokal
NPSN	Nomor Pokok Sekolah Nasional
NSS	Nomor Statistik Sekolah
NUPTK	Nomor Urut Pendidik & Tenaga Kependidikan
PGRI	Persatuan Guru Republik Indonesia
PTK	Pendidik dan Tenaga Kependidikan

PNS	Pegawai Negeri Sipil
PPG	Penataan dan Pemerataan Guru
PP	Peraturan Pemerintah
PRIORITAS	Prioritizing Reform, Innovation and Opportunities for Reaching Indonesia's Teachers, Administrators, and Students (Mengutamakan Pembaharuan, Inovasi, dan Kesempatan bagi Guru, Tenaga Kependidikan, dan Siswa)
Renstra	Rencana Strategis
Rombel	Rombongan Belajar
S1	Sarjana 1
SARA	Suku Agama Ras
SD	Sekolah Dasar
SDLB	Sekolah Dasar Luar Biasa
SDM	Sumber Daya Masyarakat
SIMPK-DAPODIK	Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Kabupaten-Kota- Data Pokok Pendidikan
SMA	Sekolah Menengah Atas
SMLB	Sekolah Menengah Luar Biasa
SMK	Sekolah Menengah Kejuruan
SMP	Sekolah Menengah Pertama
SMPLB	Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa
SNP	Standar Nasional Pendidikan
SOP	Standar Operasional Prosedur
SP	Service Provider (Penyedia Layanan)
SPM	Standar Pelayanan Minimum
STTA	Short Term Technical Assistant
TK	Taman Kanak-kanak
TKLB	Taman Kanak-kanak Luar Biasa
UNESCO	United Nations Educational Scientific and Culture Organization
UNICEF	United Nation Children Fund
UPTD	Unit Pelaksana Teknis Daerah
USAID	United States Agency for International Development
WS 1	Workshop 1
3T	Terpencil Terluar Terdalam

I. PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Permasalahan distribusi guru telah menjadi isu nasional, secara nasional rata-rata kecukupan guru sudah berlebih, namun di sisi lain kekurangan guru masih banyak terjadi di tingkat sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi ketidakseimbangan penyebaran guru kelas dan guru mata pelajaran dalam satuan pendidikan, antar satuan pendidikan, antar kecamatan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi.

Pengaturan untuk menata guru sudah dilansir sejak tahun 2007 melalui Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan antara Pusat dan Daerah, dalam PP tersebut disebutkan bahwa guru PNS dapat dipindahkan antar sekolah dalam kabupaten, antar kabupaten, dan antar provinsi. Sebagai tindak lanjut dari PP, Mendiknas menerbitkan Permendiknas No 20 tahun 2010 tentang SNPK (Standar, Norma, Prosedur, dan Kriteria), pada Permendiknas tersebut juga mengatur bagaimana melakukan mutasi guru antar sekolah dalam kabupaten, antar kabupaten dalam provinsi, dan antar provinsi.

Sampai dengan tahun 2011, hanya sedikit kabupaten/kota yang melakukan penataan guru, itupun kabupaten/kota yang difasilitasi oleh Donor, seperti USAID melalui proyek DBE dan KINERJA, serta UNICEF melalui MGP. Kabupaten lain di luar mitra Donor mulai berminat setelah keluar Peraturan Bersama (Perber) 5 Menteri (Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan Nasional, Menteri PAN dan RB, serta Menteri Agama) pada pertengahan 2011. Mengapa demikian, dalam Perber tersebut, selain mengatur kewajiban kabupaten/kota, provinsi, dan kementerian, juga memberikan sanksi kepada kabupaten/kota dan provinsi yang tidak melakukan penataan guru. Sanksi tersebut berupa: 1) penghentian kuota CPNS (MenPAN dan RB), 2) mengurangi alokasi anggaran fungsi pendidikan (Kemdikbud), 3) memberikan penilaian kinerja rendah (Mendagri), dan mengurangi dana perimbangan (MenKeu).

Penataan guru bukan sekedar memutasikan guru dari sekolah yang kelebihan ke sekolah yang kekurangan guru, tetapi sebagai *entry point* dalam penataan sekolah secara menyeluruh. Sejalan dengan itu, USAID PRIORITAS memberikan perhatian khusus untuk membantu kabupaten/kota dalam menyiapkan analisis data pokok pendidikan (DAPODIK) sebagai langkah awal untuk menyiapkan peta distribusi guru dan selanjutnya menyiapkan alternatif-alternatif kebijakan berdasarkan hasil analisis dan isu-isu strategis dalam distribusi guru.

B. Tujuan

Panduan ini bertujuan untuk memudahkan fasilitator, tim teknis PPG Kabupaten/kota, dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan kegiatan penataan dan pemerataan guru. Selain itu, memperkenalkan pendekatan analisis data dalam memetakan distribusi guru dan analisis kebijakan dalam mengidentifikasi opsi-opsi kebijakan, menyusun rekomendasi kebijakan, dan memformulasikan kebijakan. Secara khusus panduan ini bertujuan untuk:

- Mengembangkan kapasitas tim teknis analisis data dalam menggunakan software analisis data pokok pendidikan (DAPODIK)
- Mengembangkan kapasitas tim teknis kebijakan dalam melakukan analisis kebijakan berkaitan dengan penataan dan pemerataan guru
- Mempersiapkan rencana implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru.

C. Pendekatan dan tahapan kegiatan

Penataan dan pemerataan guru merupakan kebijakan yang positif, karena dapat meningkatkan mutu layanan pendidikan secara merata. Namun kebijakan ini menjadi sensitif, karena berdampak pada aspek sosial, ekonomi, dan bahkan politik. Untuk mengurangi resistensi dari yang terkena dampak penataan guru, diperlukan payung hukum yang kuat, oleh sebab itu dalam mengimplementasikan kebijakan penataan guru harus didasarkan pada berbagai peraturan yang ada.

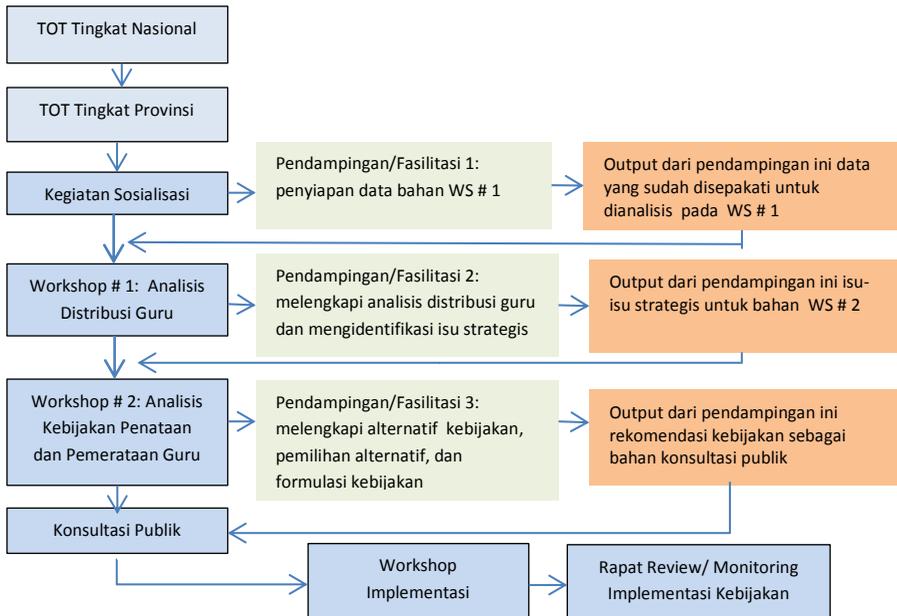
Pendekatan lainnya adalah memanfaatkan praktik-praktik yang baik, hal ini digunakan untuk meningkatkan efisiensi proses dan efektivitas hasil kegiatan. Selain itu, pemanfaatan praktek yang baik dapat meyakinkan pemangku kepentingan pendidikan di kabupaten/kota bahwa ternyata ada kabupaten/kota lain yang telah melaksanakan PPG dengan hasil yang lebih baik.



Tahapan pendampingan PPG pada Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota terdiri atas 4 kegiatan, yaitu: 1) Sosialisasi, 2) Workshop Analisis Data, 3) Workshop Analisis

Kebijakan, dan 4) Konsultasi publik. Di antara kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan pendampingan oleh fasilitator provinsi, yaitu GMS, STTA, dan SP.

1. Sosialisasi, bertujuan untuk membangun komitmen bersama antara USAID PRIORITAS dengan Kabupaten/Kota mitra dalam penataan dan pemerataan guru, serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya data sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan
2. Workshop 1: Analisis Data dan Identifikasi Isu strategis, Kegiatan ini menekankan pada pemetaan distribusi guru secara rinci dan merumuskan isu-isu strategis berdasarkan hasil analisis data untuk penataan dan pemerataan guru
3. Workshop 2: Analisis Kebijakan Kegiatan ini menekankan pada identifikasi langkah-langkah analisis kebijakan (alternatif kebijakan, menyusun kriteria pemilihan alternatif kebijakan, menyusun rekomendasi kebijakan), merancang implementasi kebijakan, serta menghitung dampak dari penetapan kebijakan.
4. Konsultasi Publik Kegiatan ini menekankan pada sosialisasi rekomendasi kebijakan untuk memperoleh balikan dari rekomendasi kebijakan yang telah diusulkan.



D. Pengertian Penataan dan Pemerataan Guru

Pengertian Penataan dan Pemerataan Guru (PPG) dalam Panduan Praktis PPG ini dikutip dari Petunjuk Teknis Penataan dan Pemerataan Guru tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut:

1. Penataan guru PNS adalah proses menata ulang agar rasio, kualifikasi akademik, distribusi, dan komposisi guru PNS sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan.
2. Komposisi guru adalah perbandingan jumlah guru dalam satuan pendidikan sesuai dengan rombongan belajar atau mata pelajaran yang diampu sesuai dengan kebutuhan riil masing-masing satuan pendidikan
3. Suatu satuan pendidikan harus memiliki guru kelas, guru mata pelajaran, guru bimbingan dan konseling atau konselor sesuai dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan
4. Pemindehan guru PNS adalah proses penugasan guru antar satuan pendidikan, antar jenjang, antar jenis pendidikan, antar kabupaten/kota, dan antar provinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.

II. SOSIALISASI/PENYAMAAN PERSEPSI

A. Persiapan Penyamaan Persepsi

Salah satu kegiatan USAID PRIORITAS adalah memfasilitasi kabupaten/kota dalam penataan dan pemerataan guru. Pendekatan yang dikembangkan USAID PRIORITAS perlu disosialisasikan dan disepakati bersama dengan kabupaten/kota yang akan mengimplementasikan hasil penataan dan pemerataan guru.

Tujuan	Membangun kesepakatan antara pemerintah kabupaten/kota atau diwakili oleh Dinas Pendidikan dengan USAID PRIORITAS untuk bersama-sama melakukan analisis dan merumuskan kebijakan penataan dan pemerataan guru.
Output	Kesepakatan bersama untuk melakukan PPG di kabupaten yang bersangkutan
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Audiensi dengan pimpinan daerah untuk menyampaikan tujuan, mekanisme/metode pelaksanaan PPG2. Identifikasi ketersediaan data, khususnya DAPODIKDAS3. Kesepakatan jadwal dan unsur yang akan diundang dalam acara Penyamaan Persepsi
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pusat dan Daerah2. Peraturan Bersama 5 menteri tentang PPG3. Permendiknas No 20 tahun 2010 tentang SNPK4. Permendiknas No 62 tahun 2013 tentang Sertifikasi dalam Rangka Penataan Guru
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none">1. Dinas Pendidikan2. Badan Kepegawaian Daerah3. Dewan Pendidikan4. Kemenag

B. Pelaksanaan Penyamaan Persepsi



Walaupun penataan dan pemerataan guru telah menjadi kebutuhan seluruh kabupaten/kota, tetapi masih banyak kabupaten/kota yang belum jelas bagaimana cara melaksanakannya. Untuk itu, diperlukan penyamaan persepsi tentang bagaimana PPG

dilaksanakan di masing-masing kabupaten/kota.

Tujuan	Membangun komitmen bersama dari seluruh pemangku kepentingan pendidikan kabupaten untuk melaksanakan dan mengimplementasikan penataan dan pemerataan guru di kabupaten/kota yang bersangkutan
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya kesepakatan untuk melaksanakan PPG dalam bentuk rencana tindak lanjut kegiatan. 2. Kesepakatan penggunaan sumber data yang akan dianalisis dalam PPG, termasuk akses data yang relevan dengan PPG 3. Terbentuknya Tim PPG 4. Tersedianya data untuk dianalisis
Durasi Waktu Tahapan Kegiatan	<p>Satu hari efektif</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengantar tentang pendekatan PPG model USAID PRIORITAS dan Testimoni 2. Paparan peta awal distribusi guru di kabupaten/kota (data riil) 3. Arahan Bupati/Walikota sekaligus membuka acara 4. Diskusi
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Modul dan Powerpoint Penyamaan Persepsi Unit I sd. 4 2. Video Testimoni PPG
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/Walikota 2. DPRD Komisi Pendidikan 3. Bappeda 4. Dinas Pendidikan 5. Badan Kepegawaian Daerah 6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 7. Dewan Pendidikan 8. Wakil Pengawas

9. Wakil Kepala Sekolah
10. Wakil Guru
11. LSM bidang pendidikan
12. Media
13. PGRI atau organisasi guru lainnya yang diakui

Catatan

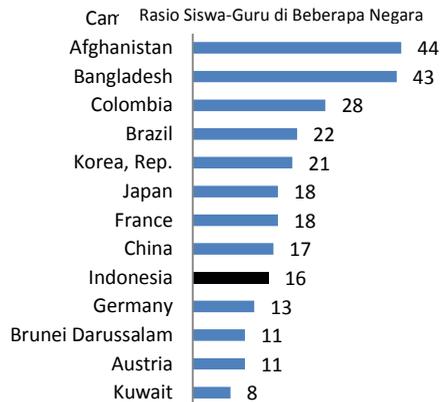
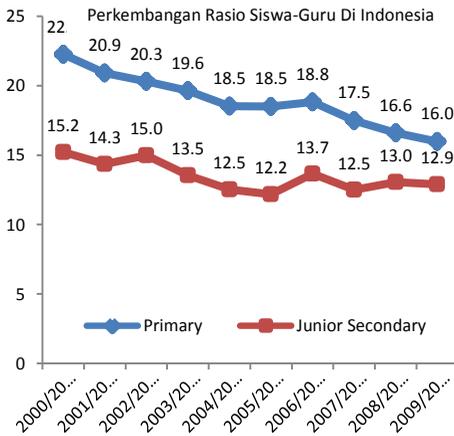
Moderator diusahakan yang mampu mengadvokasi/mendorong pemerintah daerah untuk mengambil inisiatif melaksanakan PPG

III. WORKSHOP ANALISIS DISTRIBUSI GURU

A. Persiapan Workshop Analisis Data

Unit analisis dalam distribusi guru tidak hanya tingkat kabupaten/kota , tetapi menggunakan unit analisis yang lebih rendah, yaitu individu guru, sekolah dan kecamatan. Dengan menggunakan unit analisis yang lebih rendah dimungkinkan melakukan analisis yang lebih detil, seperti analisis tabulasi silang, dan penggunaan diagram yang lebih rinci.

Pendekatan workshop yang digunakan memiliki dua sasaran, yaitu pengembangan kapasitas staf teknis Tim Analisis Data, dan menghasilkan analisis yang dapat dimanfaatkan secara langsung untuk menyajikan profil distribusi guru.



B. Penyiapan Data dan Kesepakatan Data Set yang Akan Dianalisis

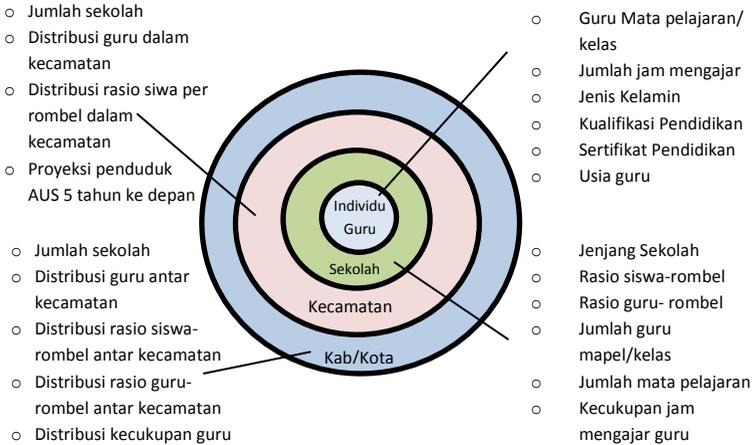
Keberhasilan analisis data distribusi guru sangat tergantung pada kualitas data yang ada di kabupaten/kota. Data yang digunakan bukan berasal dari data agregat yang ada di Dinas Pendidikan, tetapi data individu guru, individu siswa, dan sekolah. Ketiga jenis data tersebut telah dibangun dalam sistem pendataan di Kemendikbud melalui Data Pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDas).

Tujuan	Menyiapkan kelengkapan DAPODIK masing-masing sekolah dan APBD sektor pendidikan 3 tahun terakhir
Output	Tersedianya data yang siap dianalisis
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembentukan Tim Teknis Analisis data di kabupaten/kota (Dinas Pendidikan, BKD, dan Kemenag) 2. Mengunduh data dari DAPODIKDas 3. Identifikasi kelengkapan dan validitas data
Durasi Waktu	Dua hari efektif
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Praktis Analisis DAPODIKDas 2. SOP DAPODIKDas
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kasubbag Program Dinas Pendidikan kabupaten/kota 2. Kepala Seksi Data dan Informasi BKD 3. Kepala Seksi Program/Pendidikan Agama Islam Kemenag 4. Operator DAPODIKDas

C. Pelaksanaan Workshop Analisis Data

Penguatan kapasitas Tim Teknis Analisis Data Distribusi Guru dilakukan melalui workshop. Pendekatan ini dianggap lebih efektif, karena pada kegiatan workshop, peserta lebih banyak melakukan praktek dibandingkan dengan mendengar ceramah. Pada saat praktik, peserta menggunakan data masing-masing kabupaten/kota, sehingga selain *skill* mereka dalam analisis data meningkat juga hasil analisis dapat digunakan langsung untuk kegiatan berikutnya.

Pelaksanaan workshop menggunakan pendekatan kluster menurut provinsi, setiap provinsi terdiri dari beberapa kabupaten/kota mitra USAID PRIORITAS. Hal ini dilakukan agar setiap kabupaten/kota bisa belajar dari kabupaten/kota lainnya.



Tujuan	Memetakan distribusi guru secara rinci dan merumuskan isu-isu strategis berdasarkan hasil analisis data untuk penataan dan pemerataan guru
Output	Peta kecukupan (kelebihan dan kekurangan) guru antar mata pelajaran, antar sekolah dalam kecamatan dan antar sekolah antar kecamatan, serta isu strategis distribusi guru.
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyajian Materi: <ol style="list-style-type: none"> a. Kerangka Analisis Penataan dan Pemerataan Guru b. Penyiapan Data dan Pengenalan Software c. Analisis Data untuk Penataan dan Pemerataan Guru 2. Latihan analisis data dengan menggunakan data masing-masing kabupaten/kota 3. Diskusi kelompok dalam kabupaten/kota, setiap kabupaten/kota dapat dibagi 2-3 sub kelompok dan diskusi kelompok antar kabupaten/kota 4. Kunjung karya ke kabupaten lain 5. Penyusunan RTL
Durasi Waktu	Tiga hari efektif
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru 2. Panduan Praktis Analisis Data 3. Modul dan Bahan Paparan WSI, Unit 1 sd Unit 6 4. Worksheet

Unsur
yang
terlibat

Tim Teknis Kabupaten/kota, terdiri dari:

1. Kasubbag Program Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota
2. Operator DAPODIK (2 orang)
3. Bidang Data dan Informasi BKD
4. Bidang Data dan Evaluasi Program Bappeda
5. Seksi Pendidikan Islam Kantor Kemenag

IV. PENDAMPINGAN PASCA WORKSHOP I

Dalam rangka melengkapi dan menyempurnakan hasil analisis data dan identifikasi isu-isu strategis yang telah dihasilkan dari kegiatan workshop dirasa perlu dilakukan pendampingan oleh tim USAID PRIORITAS kepada Tim Teknis Analisis Data . Pendampingan dilakukan untuk membantu Dinas Pendidikan khususnya Tim Teknis Analisis Data dalam pemutakhiran data, analisis data dan identifikasi isu-isu strategis.

Pendampingan akan dilakukan sebanyak 2 kali (masing-masing 2 hari) disesuaikan dengan kondisi dan dinamika riil di kabupaten/kota. Dalam pendampingan ini tim fasilitator akan mendatangi dan mendampingi tim analisa data di kabupaten/kota masing-masing.

Tujuan	Pendampingan bertujuan untuk melengkapi hasil analisis data dan isu strategis yang belum selesai pada saat workshop
Output	Peta distribusi guru pada jenjang SD dan SMP yang mencakup kecukupan guru kelas dan guru mata pelajaran antar satuan pendidikan dalam kecamatan dan antar kecamatan, rasio siswa-rombel dan rasio guru kelas-rombel, proyeksi guru memasuki pensiun, dan proyeksi perkembangan AUS (Anak Usia Sekolah)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kegiatan yang belum selesai pada Workshop I 2. Koordinasi dengan Tim Teknis Pendataan untuk menentukan waktu dan tempat pendampingan (Tugas DC) 3. Tim Teknis bersama GMS dan SP melengkapi hasil analisis dan isu strategis dalam distribusi guru 4. Tim Teknis didampingi GMS/STTA/SP menyajikan hasil analisis dan isu strategis kepada kepala dinas atau pejabat yang berwenang lainnya.
Durasi Waktu	Dua kali pendampingan (@ dua hari)
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru 2. Modul Workshop 2, Unit 7 3. Worksheet
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Teknis Pendataan 2. DC 3. GMS/STTA/SP

V. ANALISIS KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU

Salah satu pendekatan yang digunakan dalam pengambilan kebijakan adalah analisis kebijakan. Pendekatan ini sering dipandang berbelit-belit, karena prosesnya cukup panjang. Namun pendekatan ini dianggap lebih akurat karena ditunjang dengan analisis data yang akurat. Beberapa tahap analisis kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru, yaitu: 1) penetapan isu startegis, 2) menetapkan tujuan pengambilan kebijakan berdasarkan isu yang telah dipilih, 3) Mengidentifikasi alternatif kebijakan, 4) kriteria pemilihan alternatif kebijakan, 5) menyusun rekomendasi kembangjian, dan 6) merumuskan formulasi kebijakan.



A. Menyepakati Isu Strategis

Analisis kesenjangan yang dihasilkan pada tahap analisis data adalah ketersediaan guru kemudian mengidentifikasi isu yang harus segera ditangani. Namun demikian, karena berbagai keterbatasan sumberdaya yang ada, isu-isu yang ada perlu dianalisis mana yang benar-benar strategis. Hal ini penting agar dampak kebijakan dapat

dirasakan secara lebih luas dan menyentuh pada permasalahan yang sangat mendesak dan mendasar.

Tujuan	Memilih isu-isu yang berdampak pada perubahan nyata dan memiliki daya ungkit dalam perubahan kesenjangan distribusi guru
Output	Teridentifikasinya isu strategis yang akan ditindaklanjuti dalam workshop analisis kebijakan
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengidentifikasi kesenjangan ketersediaan guru antar satuan pendidikan dan antar kecamatan 2. Memilih kesenjangan yang berdampak sangat besar 3. Memilih Kesenjangan yang harus segera ditangani 4. Memilih kesenjangan yang menjadi perhatian masyarakat
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru 2. Modul dan paparan: WS 2 Unit 2 3. Worksheet
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas pendidikan 2. Tim Teknis Analisis Data 3. Tim Teknis Perumus kebijakan kabupaten/kota 4. Staf BKD 5. Staf Kemenag

B. Workshop Analisis Kebijakan

Isu tentang ketidakseimbangan distribusi guru di sekolah, baik sebagai guru kelas, maupun guru mata pelajaran terus berlarut, tanpa ada pemecahan yang konkrit mulai pada jenjang satuan pendidikan, kabupaten/kota, propinsi, hingga nasional. Dampak dari ketidakseimbangan distribusi guru ini menjadi salah satu hambatan dalam peningkatan mutu layanan pendidikan dan pengembangan keprofesian guru secara berkelanjutan.

Tujuan	Mengembangkan kapasitas dan komitmen Tim Teknis Kebijakan Kabupaten/Kota dalam melakukan analisis kebijakan dalam PPG
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumuskannya opsi-opsi kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah terpilih pada workshop I 2. Opsi kebijakan terpilih berdasarkan kriteria yang telah disepakati,

Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 3. Rumusan rekomendasi kebijakan sebagai bahan konsultasi publik 1. Memilih isu strategis yang akan dipecahkan melalui analisis kebijakan 2. Merumuskan tujuan kebijakan yang relevan dengan pemecahan isu strategis 3. Mengidentifikasi alternatif kebijakan 4. Memilih kebijakan berdasarkan kriteria pemilihan kebijakan 5. Merumuskan rekomendasi dan memformulasikan kebijakan 6. Membuat rancangan implementasi kebijakan ke dalam sistem perencanaan daerah 7. Implikasi kebijakan penataan dan pemerataan guru terhadap anggaran pendidikan
Durasi Waktu	Tiga hari efektif
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru 2. Modul dan bahan Paparan Workshop 2: Unit 2 sd. 6 3. Worksheet
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tim Perumus kebijakan kabupaten/kota (Dinas Pendidikan, BKD, Bappeda, dan Kemenag) 2. Wakil dari Dinas Pendidikan dan BKD Provinsi 3. Wakil dari LPMP

C. Pendampingan Pasca Workshop 2

Untuk melengkapi dan menyempurnakan alternatif-alternatif kebijakan yang telah dihasilkan dari kegiatan workshop 2 dirasa perlu dilakukan pendampingan oleh tim USAID PRIORITAS kepada Tim Pengambil Kebijakan. Pendampingan akan dilakukan sebanyak 2 kali (masing-masing 2 hari) disesuaikan dengan kondisi dan dinamika di kabupaten/ kota. Dalam pendampingan ini tim fasilitator akan mendatangi dan mendampingi tim pengambil kebijakan di kabupaten yang bersangkutan.

Tujuan	Melengkapi dan melakukan reviu hasil analisis kebijakan yang dilakukan pada workshop 2 PPG
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumuskannya opsi-opsi kebijakan berdasarkan isu strategis yang telah terpilih pada workshop I 2. Opsi kebijakan terpilih berdasarkan kriteria yang telah disepakati,

Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">3. Rumusan rekomendasi kebijakan sebagai bahan konsultasi publik1. Reviu hasil workshop kebijakan penataan dan pemerataan guru2. Melengkapi dan memperkaya opsi rumusan kebijakan3. Mempertajam rumusan kebijakan penataan dan pemerataan guru.4. Memprediksi berbagai dampak opsi rumusan kebijakan yang dihasilkan.5. Membuat laporan tentang kebijakan penataan dan pemerataan guru yang akan digunakan dalam audiensi dengan Bupati/ Walikota serta konsultasi publik.
Durasi Waktu	Dua kali pendampingan (@ 2 hari efektif)
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none">1. Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru2. Modul dan bahan Paparan Workshop 23. Worksheet
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas pendidikan2. Tim Perumus kebijakan kabupaten/kota3. Staf BKD4. Staf Kemenag

VI. KONSULTASI PUBLIK

Konsultasi publik dalam Penataan dan Pemerataan Guru di tingkat Kabupaten/ Kota dimaksudkan agar terjadi suatu proses interaksi antar *multi stake holders* (pemangku kepentingan) untuk memahami persoalan distribusi guru, dan menemukenali berbagai alternatif yang dapat dijadikan sebagai *input* dalam formulasi kebijakan.

A. Finalisasi Bahan Konsultasi Publik

Laporan Penataan dan Pemerataan guru merupakan gabungan dari hasil workshop 1 dan workshop 2. Kedua hasil tersebut tersusun secara sistematis dan berkesinambungan antara analisis distribusi guru dan isu strategis dengan opsi kebijakan dan rekomendasi kebijakan.

Hasil kegiatan dalam laporan ringkasan (eksekutif) dan laporan lengkap. Selain itu, perlu disiapkan bahan paparan dalam bentuk powerpoint

Tujuan	Menyiapkan bahan audiensi dengan Bupati/Walikota dan bahan paparan konsultasi publik
Output	<ol style="list-style-type: none">1. Draft Laporan Lengkap penataan dan pemerataan guru2. Laporan eksekutif penataan dan pemerataan guru3. Bahan Paparan (powerpoint)
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none">1. Reviu hasil workshop 1 dan 22. Lakukan analisis keterkaitan antara kesenjangan, isu strategis, alternatif kebijakan3. Lakukan analisis apakah rekomendasi kebijakan cukup realistis bisa diterapkan di kabupaten/kota tersebut4. Susun draf laporan dan bahan paparan
Durasi Waktu	Dua hari efektif
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none">1. Output workshop 12. Output Workshop 2
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Dinas pendidikan2. Tim Perumus kebijakan kabupaten/kota3. Staf BKD4. Staf Kemenag5. Staf Dinas Pendidikan

B. Audiensi dengan Bupati/Walikota

Sebagai pengambil kebijakan di tingkat kabupaten/kota, Bupati/Walikota hendaknya mengetahui sedini mungkin tentang rencana kebijakan yang akan dipilih dalam penataan dan pemerataan guru. Selain itu, dalam audiensi diharapkan ada arahan kebijakan makro tingkat kabupaten/kota yang relevan dengan kebijakan penataan dan pemerataan guru.

Tujuan	Menyampaikan rencana kebijakan penataan dan pemerataan guru sekaligus tanggapan dari Bupati/Walikota terhadap rekomendasi kebijakan
Output	Komitmen kepala daerah untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengatur jadwal audiensi (tugas DC berkomunikasi dengan kepala Dinas Pendidikan) 2. Menyiapkan bahan audiensi (Laporan eksekutif) 3. Laporan Kepala Dinas Pendidikan tentang hasil kegiatan penataan dan pemerataan guru 4. Tanggapan dari Bupati/Walikota
Durasi Waktu	Satu hari efektif
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil analisis pemetaan distribusi dan rekomendasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 2. Laporan eksekutif 3. Bahan Paparan
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/Walikota 2. Bappeda 3. Dinas Pendidikan 4. Badan Kepegawaian Daerah

C. Pelaksanaan Konsultasi Publik

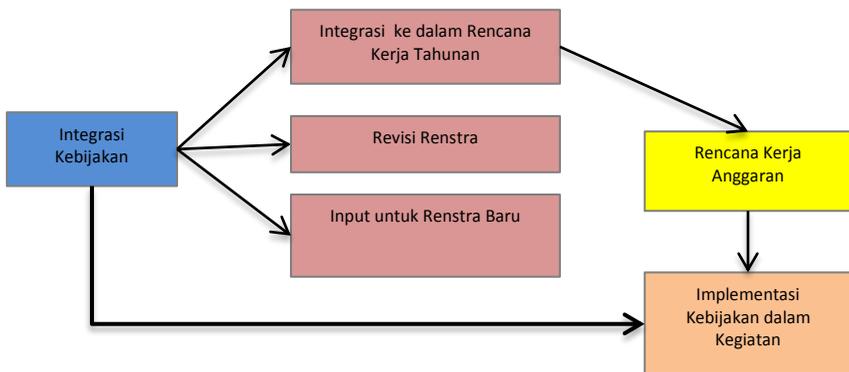
Konsultasi publik merupakan wujud keterlibatan langsung para pemangku kepentingan untuk berkontribusi pada perumusan kebijakan penataan dan pemerataan guru sekaligus pengakuan terhadap hak-hak dasar masyarakat untuk mengetahui rencana kebijakan yang berdampak pada mereka.

Selain itu untuk mengurangi resistensi terhadap kebijakan, juga diharapkan adanya masukan yang konstruktif terhadap rencana implementasi kebijakan tersebut..

Tujuan	Mensosialisasikan peta distribusi guru dan rekomendasi kebijakan penataan dan pemerataan guru dan sekaligus masukan dari para pemangku kepentingan pendidikan
Output	Komitmen bersama untuk mengimplementasikan rekomendasi kebijakan dalam penataan dan pemerataan guru
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Paparan hasil analisis distribusi guru dan rekomendasi kebijakan Penataan dan Pemerataan Guru 2. Tanggapan Pemerintah Daerah atas hasil analisis 3. Diskusi/tanggapan terhadap rekomendasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 4. Kesepakatan sementara tentang rekomendasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 5. Rencana implementasi kebijakan
Durasi Waktu	Satu hari efektif
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil analisis pemetaan distribusi dan rekomendasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 2. Laporan eksekutif penataan dan pemerataan guru 3. Bahan Paparan
Unsur yang terlibat:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bupati/Walikota 2. DPRD Komisi Pendidikan 3. Bappeda 4. Dinas Pendidikan 5. Badan Kepegawaian Daerah 6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota 7. Dewan Pendidikan 8. Wakil Pengawas 9. Wakil Kepala Sekolah 10. Wakil Organisasi Guru (PGRI atau organisasi lainnya yang diakui) 11. LSM bidang pendidikan 12. Media
Catatan	<i>Moderator Konsultasi Publik diusahakan orang yang menguasai masalah PPG secara komprehensif atau yang mampu mendorong/mengadvokasi pemerintah kabupaten/kota untuk segera mengambil langkah dalam mengimplementasikan kebijakan PPG</i>

VII. RENCANA IMPLEMENTASI

Kebijakan tidak akan memberikan makna apa-apa apabila kebijakan tersebut tidak diimplementasikan dalam bentuk program dan kegiatan. Untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut, rekomendasi kebijakan yang telah dirumuskan perlu dimasukkan ke dalam sistem perencanaan daerah (rencana kerja tahunan dan/atau rencana strategis) agar memperoleh kepastian bahwa kebijakan tersebut menjadi program dan kegiatan, serta ada kepastian pendanaannya, apabila kebijakan tersebut berimplikasi kepada penganggaran.



A. Persiapan Workshop Implementasi Kebijakan

Kesepakatan-kesepakatan dalam konsultasi publik perlu dipertimbangkan dan diintegrasikan ke dalam rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil analisis data dan analisis kebijakan. Tugas Tim perumus adalah bagaimana memadukan hasil analisis dengan masukan dari peserta konsultasi publik. Hasil rumusan tersebut menjadi draf skala prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan.

Tujuan	Mempertajam dan menyusun skala prioritas kebijakan yang akan diimplementasikan
Output	Rekomendasi kebijakan yang siap diimplementasikan
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rapat Tim Perumus yang terdiri dari Tim Teknis Analisis Data, Tim Teknis Analisis Kebijakan, dan GMS/STTA/SP 2. Mengidentifikasi rekomendasi kebijakan yang layak untuk diimplementasikan

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Penetapan skala prioritas kebijakan yang akan dibahas pada workshop implementasi kebijakan 4. Identifikasi berbagai peraturan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan prioritas kebijakan PPG yang menjadi prioritas 5. Pengelompokkan implementasi kebijakan, yaitu perumusan regulasi /petunjuk teknis dan rancangan implementasi berdasarkan sasaran khusus (kecamatan, sekolah dan guru) 6. Pembentukan Tim Implementasi untuk penataan guru dalam kecamatan (SK Kepala Dinas atau Kepala UPTD Dinas Pendidikan Kecamatan) 7. Melakukan verifikasi data yang relevan dengan prioritas kebijakan yang akan dibahas dalam workshop.
Durasi Waktu	Dua hari efektif
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil analisis pemetaan distribusi dan rekomendasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 2. Laporan eksekutif penataan dan pemerataan guru 3. Masukan dari peserta konsultasi publik
Unsur yang terlibat:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Tim Perumus kebijakan kabupaten/kota 3. Staf BKD 4. Staf Bappeda 5. GMS/STTA/SP

B. Rancangan Workshop Implementasi Kebijakan

Agar kebijakan penataan dan pemerataan guru benar-benar dapat diimplementasikan pada sasaran spesifik (menunjuk langsung: siapa guru yang akan kena penataan, di sekolah di mana dia bertugas (jika dimutasi: ke sekolah mana), dan berdomisili di kecamatan apa), maka perlu dilakukan workshop implementasi kebijakan pada tingkat pelaksana langsung di lapangan (kecamatan dan sekolah)

Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan kapasitas staf dinas pendidikan dalam implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 2. Penerapan langsung kebijakan tingkat kabupaten/kota pada tingkat sekolah dan kecamatan 3. Menyesuaikan kebijakan penataan guru dengan kondisi lokal.
Output	Rencana implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru pada tingkat sekolah dan kecamatan

Tahapan Kegiatan	<p>Hari Pertama</p> <p>Unit 1: Analisis kebijakan terpilih berdasarkan hasil konsultasi publik</p> <p>Unit 2: Penyusunan substansi regulasi/petunjuk</p> <ul style="list-style-type: none"> • Sudah ada regulasi/draft • Belum ada regulasi <p>Hari Kedua</p> <p>Unit 3: Operasionalisasi/penguatan substansi regulasi/petunjuk</p> <p>Unit 4: Analisis resiko (meminimalisasi resistensi dari yang terkena kebijakan)</p> <p>Unit 5: RTL</p>
Durasi Waktu	Dua hari efektif
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan hasil analisis pemetaan distribusi dan rekomendasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 2. Laporan eksekutif penataan dan pemerataan guru 3. Hasil rumusan rekomendasi kebijakan yang siap diimplementasikan
Unsur yang terlibat	<p>Hari Pertama</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala Dinas Pendidikan 2. Kabid Pendidikan Dasar 3. Kabid/Seksi PTK 4. Kasubag Perencanaan 5. BKD 6. BKKAD 7. Bappeda 8. Bagian Hukum 9. Kantor Kemenag 10. Dewan Pendidikan 11. PGRI <p>Hari Kedua</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Staf Dinas Pendidikan 2. Staf Badan Kepegawaian Daerah 3. Kepala UPTD/KCD/ Dinas Pendidikan Kecamatan 4. Koordinator Pengawas 5. Wakil Kepala Sekolah/MKKS 6. Wakil Guru/KKG/MGMP 7. Komite Sekolah

C. Pendampingan Penyusunan Rancangan Implementasi Kebijakan

Untuk mengimplementasikan rencana kebijakan yang telah dihasilkan dari kegiatan workshop Implementasi Kebijakan dirasa perlu dilakukan pendampingan oleh tim PRIORITAS kepada Tim Implementasi Kebijakan. Dalam pendampingan ini tim fasilitator akan mendatangi dan mendampingi tim implementasi kebijakan di kabupaten/kecamatan yang menjadi sasaran implementasi kebijakan.

Tujuan	Menindaklanjuti rancangan implementasi yang dihasilkan pada workshop implementasi kebijakan PPG.
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terumuskannya rancangan implementasi kebijakan berdasarkan prioritas rekomendasi kebijakan 2. Terumuskannya peraturan/petunjuk teknis pelaksanaan penataan guru yang akan diimplementasikan
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review hasil workshop implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 2. Melengkapi dan memperkaya langkah-langkah rancangan impleemtasi kebijakan 3. Merumuskan peraturan/petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan penataan dan pemerataan guru. 4. Mengintegrasikan rancangan implementasi kebijakan penataan guru ke dalam perencanaan tahunan (Renja) dan atau Rensta. 5. Menyusun laporan tentang rancangan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru
Durasi Waktu	Dua kali pendampingan (@ 2 hari efektif)
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru 2. Modul dan bahan Paparan Workshop Implementasi Kebijakan 3. Worksheet
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala dinas pendidikan 2. Tim implementasi kebijakan kabupaten/kota (lintas SKPD) 3. Kepala UPTD kecamatan yang terkena implementasi kebijakan 4. Kepala sekolah/wakil guru yang terkena implementasi kebijakan 5. Komite sekolah/unsur masyarakat

D. Rapat Riview/Monitoring Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru rentanmg dengan penolakan oleh terkena dampak kebijakan, serta hambatan teknis lainnya. Untuk itu, diperlukan suatu pertemuan rutin dan berkala untuk memonitor dan memecahkan berbagai kebutuhan dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kegiatan rapat review implementasi kebijakan dilakukan bersama dengan pemangku kepentingan dalam penataan dan pemerataan guru, serta melibatkan pihak-pihak yang terkena dampak penataan guru tersebut. Kegiatan ini dilakukan secara periodik dalam jangka waktu triwulanan.

Tujuan	Memastikan bahwa kebijakan yang telah direncana dapat berjalan dengan baik
Output	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terpecahkannya berbagai permasalahan dalam implementasi kebijakan PPG 2. Terimplementasikannya peraturan/petunjuk teknis pelaksanaan penataan guru
Tahapan Kegiatan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Review perkembangan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru 2. Membahas berbagai permasalahan dalam impelemntasi kebijakan 3. Mengintegrasikan rancangan implementasi kebijakan penataan guru ke dalam perencanaan tahunan (Renja) dan atau Rensta. 4. Menyusun laporan tentang rancangan implementasi kebijakan penataan dan pemerataan guru
Durasi Waktu	Triwulanan (@ 1-2 hari efektif)
Bahan Bacaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Panduan Praktis Penataan dan Pemerataan Guru 2. Modul dan bahan Paparan Workshop Implementasi Kebijakan 3. Worksheet
Unsur yang terlibat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala dinas pendidikan 2. Tim implementasi kebijakan kabupaten/kota (lintas SKPD) 3. Kepala UPTD kecamatan yang terkena implementasi kebijakan 4. Kepala sekolah/wakil guru yang terkena implementasi kebijakan 5. Komite sekolah/unsur masyarakat

www.prioritaspendidikan.org